

Peran Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bantuan Kebencanaan

Muhammad Taufiq Hidayat Putra P^{1*}, Muhammad Hamrin NurWahyu², Ahmad Nur Muhammad Syahrul A³, Abdul Wahab⁴

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Nusa Tenggara Barat^{1,2,3}

Email: 30.1203@praja.ipdn.ac.id¹, chocolatoz050@gmail.com²,

ahmadsyahrul082@gmail.com³, abdul@ipdn.ac.id⁴

Artikel info

Artikel history

Diterima : 16-09-2022

Direvisi : 18-09-2022

Disetujui : 20-09-2022

Kata Kunci:

Syafaat Alquran; Hari Penghisaban; Hadis; Qari.

Keywords: Defender, Hereafter; Hadith; Qari

Abstrak

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dari kerugian yang ditimbulkan dibutuhkan kesigapan agar mengurangi efek samping yang akan terjadi. Dinas sosial merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki peran penting dalam keterlibatan pada penyaluran bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Peran ini juga sebagai bentuk kesigapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada penyelenggaraan tanggap bencana. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi besar dengan tingkat potensi kebakaran yang tinggi. Penelitian ini mengkaji tentang peran serta upaya dinas sosial provinsi Sulawesi selatan dalam tanggap bencana guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terdampak bencana misalnya dengan memberi bantuan logistic berupa pemenuhan kebutuhan yang kurang seperti makanan siap saji, tenda sementara, serta kebutuhan wanita dan anak-anak. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penyusunannya dalam menghasilkan kesimpulan.

Abstract

Disasters are a series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods caused by both natural and non-natural and human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and psychological impacts. From the losses caused, alertness is needed in order to reduce the side effects that will occur. The social service is one of the government institutions that has an important role in being involved in the distribution of social assistance needed by disaster-affected communities. This role is also a form of alertness carried out by the Social Service in the implementation of disaster response. South Sulawesi Province is one of the large provinces with a high level of fire potential. This study examines the role and efforts of the social services of the South Sulawesi province in disaster response to overcome problems that occur in disaster-affected communities, for example by providing logistical assistance in the form of fulfilling needs that are lacking such as fast food, temporary tents, and the needs of women and children. This study was studied using descriptive qualitative research methods in its preparation in producing conclusions.

Koresponden author: Muhammad TaufiqHidayat Putra P

Email: 30.1203@praja.ipdn.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan kekeringan terjadi hampir di seluruh daerah ([Heryati](#), 2020). Permasalahan bencana disebabkan berbagai hal, mulai dari kondisi geografis hingga ulah manusia itu sendiri ([Hedriyanti & Syamsuddin](#), 2021). Indonesia juga terletak di jalur tiga lempeng tektonik yang aktif, yaitu Indo-Australia di sebelah Selatan, Eurasia di sebelah Utara dan lempeng Pasifik di Timur ([Syam](#), 2016). Indonesia juga dilalui oleh jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan termasuk ke dalam jalur pegunungan aktif ring of fire atau cincin api pasifik dunia yang merupakan jalur pegunungan aktif dan merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik ([Tyas et al.](#), 2020). Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km dan sering pula disebut sebagai sabuk gempa pasifik ([Frastika et al.](#), 2013).

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ([Pahleviannur](#), 2019). Bencana ada macam-macamnya, yaitu bencana alam, bencana sosial, kejadian bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, angin puting dan gelombang pasang atau badai ([Ari et al.](#), 2019). Menurut data yang dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhitung sejak awal tahun 2019 hingga akhir bulan Maret 2019 peristiwa bencana yang menimpa wilayah Indonesia mencapai 1.256 kejadian bencana dengan korban jiwa sebanyak 367 meninggal dan hilang, 1.385 luka-luka, dan 649.490 terdampak dan mengungsi ([Bencana](#), 2019).

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak ([Novimaimory](#), 2019). Jaminan ini tercantum pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ([Indonesia](#), 2004). Utamanya merupakan sebuah bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ([Asmuni](#), 2020).

Pada dasarnya pada kebencanaan terdapat 3 tahapan yaitu pra-bencana, tanggap bencana serta pasca bencana ([Widianto](#), 2019). Akan tetapi pada kondisi bencana kebakaran yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terus bertambah membuat resiko terjadinya kejadian kebakaran yang datang secara tiba-tiba meningkat yang sulit untuk diprediksi. Masalah yang ada, dalam pelaksanaannya adalah program-program penanggulangan terkadang hanya dalam program tanggap darurat semata. Program penanggulangan bencana baik itu pra dan pasca kurang diperhatikan oleh Lembaga-lembaga pelayanan kebencanaan. Akibatnya dampak yang terjadi akan lebih berat dan sulit dalam proses rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi dari korban bencana itu sendiri ([Fillah et al.](#), 2016).

Kondisi akibat bencana tersebut sehingga diketahui warga membutuhkan banyak bantuan berupa air bersih, obat-obatan, masakan siap saji, tenda atau terpal, peralatan memasak, beras dan lauk pauk, pakaian layak pakai, selimut serta kebutuhan kelompok rentan. Setelah

pendataan kebutuhan *logistic* korban terdampak kebakaran tersebut telah rampung kemudian assesmen kebutuhan tersebut diserahkan kepada pihak Dinas Sosial yang mana kemudian memberikan bantuan *logistic* yang dibutuhkan. Akan tetapi sebelum menyetujui assesmen kebutuhan *logistic* tersebut, pihak Dinas Sosial provinsi melakukan pengecekan di website simlok guna memeriksa ketersediaan *logistic* yang dibutuhkan apakah mencukupi. Setelah diperiksa dan ketersediaan *logistic* tersebut memenuhi kemudian pihak Dinas Sosial melakukan pendataan barang keluar pada gudang *logistic* yang mana kemudian diperbarui di aplikasi simlok guna memberikan transparansi akan ketersediaan kebutuhan *logistik*.

Bersamaan dengan pembaruan pendataan tersebut, pihak Dinas Sosial juga telah digerakkan menuju gudang *logistic* guna langsung menyiapkan kebutuhan *logistic* yang diperlukan agar langsung dapat diberikan kepada korban kebakaran pada tahap tanggap darurat. Akan tetapi, yang perlu diketahui disini aplikasi atau website simlok hanya dapat diakses oleh pihak Dinas Sosial Provinsi guna menjaga keaslian data dan ketersediaan barang kebutuhan korban bencana. Setelah bantuan kebencanaan disalurkan, tugas Dinas Sosial hanya berakhir hingga disitu karena yang bertugas memberikan rehabilitasi pada tahap pasca bencana dialihkan kepada pihak Dinas Kesehatan dan dinas terkait dalam memberikan bantuan pemulihan mental serta pemberian layanan kesehatan kepada korban terdampak bencana kebakaran. Berdasarkan latar belakang yang dilatar belakangi maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang peran serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada bencana.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan jurnal ini adalah dengan menggunakan cara metode kualitatif deskriptif disertai turun langsung dalam persiapan pemberian bantuan *logistik* kepada terdampak bencana ([Sugiyono, 2018](#)). Metode ini digunakan dengan cara menggabungkan berbagai jurnal dan data yang diperoleh kemudian menjelaskan materi dengan digabungkan dengan perolehan data yang berasal dari lapangan dengan berbagai dokumentasi.

Penggunaan pendekatan kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa fakta juga di harapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Sedangkan pendekatan penilaian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi penelitian dan interpretasi data yang telah di kumpul dan segala sesuatu dalam penelitian ini, yang di tentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara atau interview guide, dan catatan lapangan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengujian kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan. Analisis data yang digunakan yaitu Model Interaktif menurut Miles, Huberman dan ([Saldana, 2013](#)). Analisis metode interaktif terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Sosial dalam Bantuan Kebencanaan

Menurut ([Soekanto](#), 2012), peran merupakan aspek dinamis kedudukan/status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peran ([Hedriyanti & Syamsuddin](#), 2021). Peran diartikan pada karakteristik yang dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh actor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*). Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peraturan diatur oleh norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk kepada fungsi, penyusuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang, menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu: (a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan; (b) Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Macam-macam peran formal keluarga dan peran formal bersifat eksplisi

Menurut ([Indonesia](#), 2007), bencana adalah peristiwa atau serangkaian dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ([Pahleviannur](#), 2019). Bencana (*disaster*) menurut ([AB & DN](#), 2020) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memperburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Adapun jenis-jenis bencana, yaitu: (1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti, tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin topan, kekeringan, tsunami, dan gunung Meletus; (2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; (3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti, konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Faktor yang menjadi penyebab bencana antara lain: (1) Kemiskinan, yakni menjadi salah satu faktor bencana karena kemiskinan menyebabkan usaha pembangunan nasional terhambat, hilangnya kesempatan siswa mendapat pendidikan, tidak stabilnya bisnis formal dan nonformal

yang menyebabkan kerentanan, naiknya angka kejahatan. Semua itu akan mengarah pada kerentana sosial dan bukan tidak mungkin akan menciptakan bencana sosial seperti konflik; (2) Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada, hal ini kemudian akan menimbulkan persaingan yang ketat yang akan mengarah kepada konflik social; (3) Migrasi yang cepat membuat ketidakseimbangan suatu daerah, sehingga memicu terjadinya bencana; (4) Degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan yang terjadi seperti penggundulan hutan (*deforestasi*) akan mengakibatkan percepatan lintasan air hujan yang akan mengarah kepada banjir. Contoh lain yakni perusakan hutan bakau akan mengakibatkan penurunan kemampuan garis pantai untuk menahan angin dan gelombang badai; (5) Inovasi teknologi seperti nuklir menyebabkan kerentanan yang dapat menimbulkan bahaya. Ledakan nuklir menyebabkan tidak hanya kerusakan fisik, namun radiasi yang tinggi yang berakibat buruk pada makhluk hidup 6) Kurangnya kesadaran dan informasi Kurangnya kesadaran dan informasi akan membuat masyarakat rentan terhadap bencana.

Hal ini akan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Dengan demikian bencana juga mempunyai 2 konsep, yaitu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan penanggulangan bencana menurut Bakornas. (Nasional, 2007) mengatakan bahwa, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berakibat kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kata risiko berasal dari kata risicum yang pada awalnya digunakan dalam ilmu ekonomi (secara khusus tentang perdagangan pada abad pertengahan di sekitar Laut Tengah) dan digunakan untuk menyebut potensi kerusakan dan kehilangan dalam proses pengangkutan barang. Risiko bencana bergantung kepada besarnya kemungkinan kejadian-kejadian tertentu dan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh masing-masing kejadian tersebut. Adapun kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerentanan adalah: (a). Instruksi lokal yang lemah dalam membuat kebijakan dan peraturan serta penegakan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan resiko bencana, termasuk di dalamnya adalah lemahnya aparat penegak hukum, (b) Kurangnya penyebaran informasi mengenai kebencanaan, baik melalui penyuluhan, pelatihan serta keahlian khusus yang diperlukan dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana, (c) Penduduk terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. (Ariantoni, 2009). Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan, kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif, dan terorganisir.

Penanggulangan Bencana menurut Bakornas Penanggulangan Bencana (PB), konsep penanggulangan bencana telah mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju holistik. Paradigma ini beranggapan bahwa usaha penanggulangan bencana tidak lagi terfokus pada saat bantuan darurat melainkan terfokus pada upaya pencegahan risiko bencana (tahap preventif/mitigasi). Beberapa pengertian menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana adalah: (a) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana; (b) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna; (c) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini, dengan keterbatasan fisik maupun psikologis, peran perempuan yang dilekatkan berdasarkan sistem patriarki membuat perempuan ditempatkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap peran-peran domestik dan perawatan dalam keluarga hingga masyarakat. Sehingga, kecenderungan peran perempuan dalam proses penanggulangan bencana yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki adalah bukti bahwa sebenarnya perempuan memiliki kapasitas dalam mengelola bencana. Selain itu, beberapa penelitian mengkarakterisasi perempuan sebagai aktor sosial yang berdedikasi dan penanggap darurat yang cakap, yang mahir dalam mengakses jejaring sosial informal untuk saling menyebar informasi dan bertukar bantuan. Peran serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam bantuan kebencanaan terbagi menjadi kegiatan perencanaan, pelaksanaan penyerahan, dan pengendalian bantuan logistik.

Perencanaan Bantuan Logistik

Peran Dinas Sosial pada pemberian bantuan kebencanaan kepada korban terdampak kebakaran itu pada tahap tanggap darurat kebencanaan. Sebelum menyalurkan bantuan kebencanaan kepada korban terdampak, terlebih dahulu pihak Dinas Sosial pada tingkat UPTD Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan pendataan kebutuhan logistik yang diperlukan. Setelah mendata kebutuhan tersebut, pihak UPTD kabupaten/kota melakukan pengecekan ketersediaan logistic yang ada pada gudang provinsi melalui aplikasi simlok yang mana sebagai database ketersediaan logistic. Setelah dilakukan pengecekan dan jumlah ketersediaan logistic mencukupi kemudian pihak UPTD kabupaten/kota melakukan pengajuan kepada Dinas Sosial provinsi yang mana kemudian apabila telah diterima pihak Dinas Sosial provinsi dan diterima maka bantuan tersebut baru dapat diserahkan kepada pihak UPTD kabupaten/kota terdampak bencana. Kegiatan pengecekan ketersediaan logistic yang ada pada gudang provinsi dapat dilihat dapat gambar berikut.



Gambar 1. Kegiatan Pengecekan Ketersediaan Logistik

Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik. Identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan kegiatan awal yang harus dilaksanakan pada perencanaan dalam bidang logistik. Terdapat tiga analisis kebutuhan dasar yaitu terkait sandang, pangan, dan papan.

- a. Sandang: menghitung kebutuhan sandang berdasarkan jumlah korban dan pengungsi, ketersediaan stok. Bantuan sandang terdiri dari pakaian pribadi berdasarkan karakteristik (jenis kelamin, usia, dll), kebersihan pribadi (sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi, pampers, pembalut bagi anak gadis, dll). Misalnya anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel pakaian seragam sekolah dan sepasang sepatu yang sesuai ukurannya, setiap orang memiliki pakaian untuk ibadah, bayi memiliki selimut berukuran 100 x 70 cm; 2)
- b. Pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau makanan yang disediakan oleh dapur umum, bantuan pangan 14 untuk kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus. Misalnya Air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari (d disesuaikan dengan kebutuhan). Bahan makanan beras sebanyak 400 gram per orang per hari, makanan siap saji diberikan dua kali sehari (dapur umum), besarnya bantuan makanan tersebut setara dengan 2100 kilo kalori;
- c. Penampungan sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak atau gedung fasilitas umum/sosial yang memungkinkan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran 3 m persegi per orang. Gedung harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan serta memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan dapat menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia;
- d. Air bersih dan sanitasi. Air bersih diberikan dalam bentuk air yang berkuaklitas dan memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumahtangga. Air bersih diberikan sebanyak 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari. Sumber air bersih harus berjarak 50 m dari tempat penampungan sementara;
- e. Kebutuhan kelompok rentan dilihat dari jenis kelompok rentan. Misalnya anak-anak di bawah usia dua tahun harus diberikan selimut. Anak sekolah harus diberikan alas kaki, sepasang sepatu dan dua stel pakaian seragam.

Pemenuhan kebutuhan lainnya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikososial. Seperti fasilitas (ruangan) untuk memberikan pelayanan konseling bagi korban atau pengungsi yang mengalami trauma. Selain itu, paket peralatan terapi bermain bagi korban atau pengungsi anak-anak berupa alat-alat permainan dan mainan anak-anak berdasarkan usia.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menghitung jumlah korban, pengungsi, dan infrastruktur yang rusak dengan standar minimal logistik yang dibutuhkan. Kebutuhan logistik tahap tanggap darurat didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tanggap darurat termasuk kebutuhan air bersih (7 liter/orang/hari) dan kebutuhan sanitasi (sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun cuci (1 paket/orang). Bahan logistik lainnya yang seharusnya tersedia adalah pangan yang mencakup beras, lauk pauk (telur, ikan, daging) sebanyak 2100 kalori per orang per hari. Air minum sebanyak 1.5 liter per orang per hari. Berdasarkan peraturan yang telah tersedia mengenai bantuan penanggulangan bencana, diharapkan agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan,

perlu dilakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Logistik

Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik. Sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik. Pada tahap penyerahan bantuan logistik tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial provinsi kepada UPTD kabupaten/kota yang mana kemudian pihak UPTD kabupaten/kota disertai berbagai bantuan kemasyarakatan dari pihak lembaga pemerintah yaitu Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, hingga dari pihak lain dari Mahasiswa yaitu Siaga Ners Universitas Hasanuddin.

Tim yang dibentuk tersebut kemudian bersinergi untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana kebakaran tersebut. Sebelum pemberian bantuan dilakukan, dilaksanakan terlebih dahulu pendataan dampak bencana kebakaran tersebut yang kemudian hasil pendataan tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk sebagai assesment pemberian bantuan kepada korban bencana. Dinas Sosial Provinsi sendiri bertanggung jawab penuh terhadap pemberian bantuan sosial serta kebutuhan sehari-hari korban terdampak sebagai tindakan pasca bencana kepada korban. Peran serta yang dilakukan Dinas Sosial berupa pemberian bantuan logistik kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat terdampak bencana dengan bekerja sama dengan berbagai pihak lintas instansi hingga masyarakat ditambah lembaga masyarakat termasuk lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini mahasiswa perguruan tinggi dalam pelaksanaannya. Sehingga ini membuat pelaksanaan program pada tahap pra-bencana dan pasca bencana diserahkan kepada dinas lain yang terkait. Misalnya pada tahap pra-bencana diserahkan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja guna menertibkan bangunan yang sangat tidak teratur dan padat, kemudian pada tahap pasca bencana diserahkan kepada Dinas Kesehatan pada pelaksanaannya dalam memberikan bantuan dan jaminan kesehatan serta pemulihan psiko-sosial masyarakat yang terdampak.

Bantuan logistik bisa didapatkan melalui ketersediaan sumber daya provinsi, kabupaten/kota atau dari penerahan sumber daya baik yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha. Identifikasi sumber daya logistik, peralatan, sumber daya manusia yang tersedia di wilayah bencana, baik dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Membandingkan ketersediaan potensi logistik dan kebutuhan logistik sesuai dengan hasil analisis di wilayah. Kekurangan logistik yang diperlukan diatasi dengan penerahan sumber daya baik yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Penerahan sumber daya dari instansi/lembaga terkait berdasarkan hasil pemetaan terhadap sumber daya yang tersedia dibangun sistem informasi logistik yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha, kekurangan logistik dapat

diatasi dengan mengakses sumber daya yang tersedia di provinsi dan kabupaten/kota terdekat dan apabila tidak mencukupi dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah, kekurangan logistik juga dapat diinformasikan kepada publik yang berminat untuk mengambil peran serta dalam dukungan logistik pada penanganan darurat bencana, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pengendalian Bantuan Logistik

Dalam rangka pengendalian bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana perlu dilakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi. Pemantauan dilaksanakan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh korban bencana. Supervisi pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan logistik agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait sekaligus untuk memastikan bantuan logistik diterima oleh korban bencana, sesuai dengan kebutuhan. Supervisi dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan cara memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, aktifitas, hasil dan dampak serta biaya yang dikeluarkan. Selain itu, evaluasi dilakukan juga dengan membandingkan antara hasil pencapaian dan rencana operasi bantuan logistik;, Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor bidang logistik (klaster logistik) untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan menetapkan rencana operasi bantuan logistik berikutnya. Dinas Sosial juga ikut turun serta dalam tahap pra-bencana dan pasca bencana kebakaran yang terjadi. Karena sejatinya Dinas Sosial juga berperan penting pada tahap tersebut, seperti pada tahap pra-bencana dengan penertiban bangunan liar dan padat penduduk serta penerapan kebijakan yang menyangkut ketertiban bangunan yang dapat meningkatkan resiko timbulnya bencana kebakaran yang dampaknya bisa saja lebih besar dan luas.

Pemantauan dilaksanakan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh korban bencana. Pada tahap pasca bencana Dinas Sosial juga dapat berperan aktif pada pemberian jaminan kehidupan sosial masyarakat yang terdampak. Karena seperti yang diketahui dampak yang terjadi menyangkut kesehatan masyarakat pada pasca bencana, akan tetapi juga bagaimana kerugian materiil yang dialami masyarakat terdampak sehingga dalam hal ini Dinas Sosial dapat berperan dalam pemberian jaminan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak baik itu berupa pemberian lahan pekerjaan sementara ataupun yang lainnya. Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan penatalaksanaan pergerakan logistik secara tertib dari mulai penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian. Pelaporan logistik merupakan informasi penting bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pengamatan yang dilakukan, pada dasarnya Dinas Sosial berfokus kepada tahap tanggap bencana saja. Kemudian untuk penanganan bencana pada tahap

pra-bencana dan pasca bencana diberikan wewenang kepada Dinas terkait yang lainnya misalnya untuk pra-bencana diberikan tugas kepada BPBD dalam melakukan tindakan pencegahan terjadinya resiko bencana kebakaran yang akan terjadi nantinya. Kemudian pada tahap pasca bencana untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dalam melakukan pemberian jaminan kesehatan dan melakukan pemulihan kesehatan mental dan psikis masyarakat terdampak bencana kebakaran tersebut. Pihak Dinas terkait yang berperan dalam tahap pra-bencana dan pasca bencana dalam melakukan pelaksanaan tugasnya juga diawasi dan dibantu oleh Dinas Sosial agar lebih efektif dan efisien dalam tugasnya hingga dapat mencapai hasil yang maksimal yang ingin dicapai guna mengurangi dampak yang akan terjadi. Dilain sisi pada transparansi ketersediaan logistic telah dilakukan secara digital oleh pihak Dinas Sosial dengan membuat sistem simlok sebagai database pendataan ketersediaan logistic kebutuhan yang akan disalurkan untuk korban kebencanaan. Akan tetapi sistem database ini hanya dapat diakses oleh pihak Dinas Sosial sendiri. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan data barang yang keluar dan masuk sehingga pengelolaan logistic berjalan optimal.

Bibliografi

- AB, S., & DN, S. (2020). *Benang-benang Biru Teori Ketaganaan dan Pekerjaan Sosial*.
- Ari, M. K. H. A. A., Idayanti, R., & Munawiroh, A. (2019). Peran Perempuan dalam Penanganan Bencana: Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan Pada Jiwa Perempuan dalam Penanganan Bencana. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 583–595.
- Asmuni, A. (2020). Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 3(1), 20–42. <https://doi.org/10.37849/mipi.v3i1.191>
- Bencana, B. N. P. (2019). Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami (kelas bahaya tinggi dan sedang). *Jakarta, Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.
- Fillah, A. S., Ishartono, I., & Fedryansyah, M. (2016). Program Penanggulangan Bencana Oleh Disaster Management Center (Dmc) Dompot Dhuafa. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Frastika, Y., Pasau, G., & Prang, J. D. (2013). Estimasi Periode Ulang Gempa Bumi Di Wilayah Sulawesi Dengan Menggunakan Distribusi Gumbel. *Jurnal Mipa*, 2(2), 151–155. <https://doi.org/10.35799/jm.2.2.2013.3208>
- Hedriyanti, G., & Syamsuddin, A. B. (2021). Peran Perempuan terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 21–37.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional*. Timur Putra Mandiri.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Nasional, P. M. P. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah A. *Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional*.
- Novimaimory, A. A. (2019). Peranan Dinas Ketenagakerjaan provinsi riau dalam pemenuhan hak pekerja terhadap jaminan sosial bagi tenaga kerja. *Jurnal Pahlawan*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.31004/jp.v2i1.563>
- Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi sadar bencana melalui sosialisasi kebencanaan sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 49–55. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203>
- Saldana, J. (2013). Power and conformity in today's schools. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(1), 228–232.

- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syam, A. (2016). Kelayakan Jalur Evakuasi Tsunami di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 1(1), 11–22.
- Tyas, R. A., Pujiyanto, P., & Suyanta, S. (2020). Evaluasi manajemen Program Sekolah Siaga Bencana (SSB). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28850>
- Widianto, E. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Bagi Generasi Muda. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 51–61.